

## ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)

**Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: ramanurhuda@yahoo.co.id

**Abstract: Disparities Of Development Analysis (Study in East Java Province 2005-2011).** The purpose of this studying this research to find out some disparity which is happened in east java. Besides that, to know Kuznets hypothesis occur happen in this region and the effect of PDRB variable, PAD, DAU, and IPM about disparity of development. The data in this research use the data from 2005 until 2011. The analysis use in this research is Williamson index, Kuznets hypothesis, and bifilar regression with SPSS assistance. From this analysis produce disparity percentage appertain low, caused index percentage Williamson close on 0. Besides that, Kuznets hypothesis also occur happen in this province. From four variables above, PAD and IPM have negative influential to disparity of development. Whereasfor PDRB and DAU undetected effect because not yet measures in classic assumption experiment.

**Keywords:** development of disparity, Kuznets hypothesis, PDRB percapita, revenues of region authentic, general allocation fund, and human development index.

**Abstrak: Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011).** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga apakah hipotesis Kuznets berlaku di wilayah ini dan bagaimanakah pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2005-2011. Analisis yang digunakan adalah indeks wiliamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Dari analisis tersebut menghasilkan nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai indeks wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinsi ini. Dari empat variabel di atas, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.

**Kata kunci:** ketimpangan pembangunan, hipotesis Kuznets, PDRB perkapita, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan indeks pembangunan manusia.

---

### Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2007). Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi juga tidak lepas dari ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada PDRB kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda. Ada beberapa wilayah kota yang tingkat perkembangan PDRBnya relatif cukup tinggi, dan ada beberapa

ngan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

wilayah di kabupaten yang memiliki tingkat perkembangan PDRBnya cukup rendah. Contohnya adalah kota Surabaya, kota Kediri, kota Malang, kota Sidoarjo dan kota Gresik yang mempunyai PDRB yang cukup tinggi dikarenakan pusat kegiatan dari segala bidang perekonomian. Sedangkan untuk wilayah kabupaten seperti kabupaten Pamekasan, kabupaten Sampang, kabupaten Ponorogo dan kabupaten Bondowoso memiliki PDRB yang rendah dikarenakan tingkat kegiatan produksi perekonomian masih rendah. Keadaan ini dari tahun 2005-2011 terus mengalami perbedaan yang sangat jauh. Jika keadaan ini masih terus berlanjut, maka tingkat ketimpangannya akan semakin jauh dan pemerataan pembangunan tidak akan merata keseluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, keadaan ini bisa saja berbanding terbalik dengan pendapat Simon Kuznets dan teori Neo-klasik.

Selain itu juga, ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur tidak hanya ketimpangan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi ketimpangan fiskal dan ketimpangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbeda-beda pada setiap daerah. Rata-rata daerah yang mempunyai PDRB tinggi, mempunyai PAD dan IPM yang cukup tinggi pula.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah memainkan peran desentralisasi fiskal tentang distribusi dari daerah yang kaya ke daerah yang miskin agar tidak terjadi ketimpangan yang tajam. Kebijakan yang diambil adalah dengan dana perimbangan terutama melalui DAU, dan masing-masing daerah akan menerima DAU yang berbeda-beda tergantung pada kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Transfer DAU kesetiap daerah harus mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal atau yang disebut dengan celah fiskal. Jika kapasitas fiskal suatu daerah rendah sedangkan kebutuhan fiskalnya tinggi maka besarnya DAU yang diterima akan besar pula.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur,

apakah hipotesis Kuznets tentang U terbalik berlaku di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga, untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

### **Tinjauan Pustaka**

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irawan dan Suparmoko, 1988).

Penganut Model Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2008) beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*divergence*). Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*convergence*).

Model pertumbuhan endogen dikembangkan untuk melengkapi teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik. Teori pertumbuhan endogen pada awalnya berkembang dalam dua cabang pemikiran yang bertumpu pada pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam perekonomian (Capello, 2007).

Menurut Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*Inverted U Curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu

tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata.

Musgrave dan Rostow dalam Mangkunsoebroto (1998), mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan anggaran pendapatan yang besar untuk membiayai anggaran pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan

Untuk menghitung ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, menggunakan rumus indeks Williamson seperti dalam Safrizal (1997).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar (BPS, 2000).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat dari berbagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (BPS, BAPPENAS, UNDP, 2001).

Mopanga (2010), melakukan penelitian Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan pada PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Belanja Infrastruktur signifikan sebagai sumber utama ketimpangan. Lebih lanjut secara deskriptif, Mopanga (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan (Indeks Gini). Artinya secara vertikal pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan.

Soekarno, Analisis Dampak Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh Tahun 2004-2009. Menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan. Analisis menggunakan model regresi panel. Hasil dari penelitian ini pada model menunjukkan bahwa rasio pengeluaran pendidikan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Pada model kedua terlihat bahwa DAU/APBD memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan demikian halnya pendapatan perkapita. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perlu pengawasan dan penetapan standar penggunaan dana alokasi umum agar tepat pada tujuan dari desentralisasi yaitu memperkecil kesenjangan fiskal daerah yang pada akhirnya memperkecil ketimpangan pendapatan

### Hipotesis

- Diduga terdapat hubungan negatif antara PDRB dengan ketimpangan pembangunan.
- Diduga terdapat hubungan negatif antara PAD dengan ketimpangan pembangunan.

- c. Diduga terdapat hubungan negatif antara DAU dengan ketimpangan pembangunan.
- d. Diduga terdapat hubungan negatif antara IPM dengan ketimpangan pembangunan.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dengan rumus Indeks Wiliamson. Sedangkan untuk penelitian eksplanatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dan ketiga. Untuk rumusan kedua menggunakan rumus Korelasi Pearson.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, digunakan model regresi berganda (*multiple regression model*) yang variabel bebasnya (*dependent variable*) adalah ketimpangan pembangunan dengan menggunakan nilai indeks wiliamson pada rumusan masalah nomor satu. Sedangkan untuk variabel terikatnya (*independent variabel*) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tetapi sebelum dilakukan uji regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS Provinsi Jawa Timur. Adapun data yang digunakan adalah data PDRB perkapita, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan IPM dari tahun 2005-2011.

**Hasil dan Pembahasan**

**1. Ketimpangan Pembangunan**

Hasil perhitungan nilai Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 dapat diketahui seperti dalam tabel 1.

Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur berasal dari perbedaan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, khususnya di wilayah kota dan wilayah kabupaten. Sumbangan PDRB yang terbesar adalah dari sektor industri.

**Tabel 1 Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 2011**

Tahun	Ketimpangan Pembangunan
2005	0,1085
2006	0,1080
2007	0,1073
2008	0,1068
2009	0,1070
2010	0,1065
2011	0,1053

Kemudian yang kedua ada pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian terbesar di Provinsi Jawa Timur ada di urutan ketiga. Maka memunculkan pertumbuhan PDRB yang berbeda di wilayah kota yang sebagian besar bergerak di bidang industri, perdagangan, hotel dan restoran, dengan wilayah kabupaten yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Oleh karena itu terjadi kemajuan pembangunan di wilayah kota yang lebih cepat dibanding dengan wilayah kabupaten.

Namun pada tahun 2005-2011, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan ketimpangan pembangunan yang dihitung dengan indeks wiliamson seperti pada tabel di atas. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson tersebut ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau  $0 < VW < 1$ . Dari perhitungan indeks wiliamson tersebut diketahui pada tahun 2005 hingga 2006 mengalami penurunan dari 0,1085 menjadi 0,1080. Pada tahun 2006 hingga 2007 mengalami penurunan dari 0,1080 menjadi 0,1073. Terjadi penurunan lagi sebesar 0,0007 pada tahun 2007. Kemudian menurun kembali pada tahun 2008 sebesar 0,0005, sehingga menjadi 0,1068. Namun pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 0,0002 sehingga indeks ketimpangannya naik menjadi 0,1070. Untuk tahun 2010 terjadi penurunan lagi sebesar 0,0005 sehingga nilai indeks ketimpangannya menjadi 0,1065. Dan untuk tahun 2011 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 0,0012 sehingga nilai indeks ketimpangannya menjadi 0,1053.

Dari perhitungan tersebut, ada dua kota yang nilai ketimpangannya jauh di atas nilai ketimpangan Provinsi Jawa Timur. Dua kota

tersebut adalah kota Kediri dan Kota Surabaya, Kota Kediri mempunyai nilai ketimpangan 0,9319, 0,9144, 0,8851, 0,8730, 0,8860, 0,9131 0,8440 pada tahun 2005-2011. Sedangkan pada kota Surabaya, mempunyai nilai ketimpangan 0,6969, 0,7076, 0,7181, 0,7241, 0,7250, 0,6890, 0,6227 pada tahun 2005-2011. Ini menandakan bahwa tingkat kemajuan pembangunan pada dua kota tersebut jauh di atas kota dan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena kegiatan perekonomian di kedua kota tersebut lebih banyak bergerak di bidang industri dan perdagangan.

Namun bila dirata-rata dengan semua kabupaten dan kota yang di Provinsi Jawa Timur, ketimpangan yang terjadi di dua kota tersebut tidak terlalu dominan karena semua kabupaten kota selain dua kota tersebut ketimpangannya sangat rendah. Dengan melihat nilai indeks Williamson Provinsi Jawa Timur yang nilainya rata-rata sekitar 0,1 pada tahun 2005-2011, ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa Timur tergolong rendah. Ini dikarenakan nilai indeks Williamsonnya mendekati nilai 0.

## 2. Pembuktian Hipotesis Kuznets

Untuk mengetahui apakah Hipotesis Kuznets berlaku di Provinsi Jawa Timur, maka harus diketahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan yang akan dijelaskan dengan tabel dan hasil analisis korelasi Pearson sebagai berikut:

**Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan Pembangunan
2005	5,46	0,1085
2006	5,61	0,1080
2007	5,9	0,1073
2008	5,88	0,1068
2009	5,07	0,1070
2010	6,48	0,1065
2011	6,67	0,1053

Dari matrik korelasi Pearson, diperoleh hasil bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pemba-

ngunan adalah negatif yaitu -0,723, dan nilai signifikansinya 0,067 lebih besar 0,05. Ini berarti bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dimana pertumbuhan ekonomi naik akan menyebabkan ketimpangan pembangunan turun. Sehingga hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2011.

## 3. Hasil Analisis PDRB, PAD, DAU dan IPM

Sebelum dianalisis dengan menggunakan regresi berganda, perlu diadakan uji asumsi klasik. Dalam pengujian asumsi klasik, variabel yang lolos dalam uji ini adalah variabel PAD dan IPM. Dikarenakan PAD dan IPM tidak mengalami gejala normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokelaras yang ditandai dengan terdistribusinya data mengikuti garis diagonal dengan menggunakan analisis regresi P-Plot untuk uji normalitas, nilai VIF masing-masing variabel PAD dan IPM yang dibawah 10 yaitu 6,158 untuk uji multikolinearitas, nilai tabel Durbin Watson sebesar 2,003 yang nilai tersebut berada diantara dU dan (4 -dU) atau 1, 8964 < 2,003 < 2,1036 yang artinya lolos uji autokelaras. Dan ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y sehingga lolos uji heterokedastisitas. Sedangkan untuk variabel PDRB dan DAU tidak lolos dalam uji asumsi ini, sehingga untuk variabel ini tidak layak dalam analisis regresi ini.

Hasil pada uji F, nilainya sebesar 57,193 yang lebih besar dari nilai F tabel yaitu 7,7086. Sehingga hipotesis peneliti diterima. Untuk uji R, menunjukkan nilai sebesar 0,966, yang artinya ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa timur dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan IPM sebesar 96,6%. Dan untuk uji T, nilai t tabel dari variabel PAD dan IPM yaitu sebesar 2,1318 atau -2,1318. Sedangkan untuk nilai t hitung variabel PAD dan IPM sebesar -2,157 dan -2,247. Itu membuktikan nilai t hitung dari variabel PAD dan IPM yang mencapai -2,157 dan -2,247 lebih kecil dari nilai t tabel variabel PAD dan IPM yang mencapai -2,1318. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis peneliti untuk

variabel PAD dan IPM diterima. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Mopanga (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan semakin tinggi.

Terjadinya penurunan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari fungsi pemerintah. Adapun fungsi dari pemerintah itu sendiri diantaranya adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz, 2000). Fungsi Alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam pengaturan distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.

Selain itu, adanya otonomi dan desentralisasi fiskal akan lebih memertakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing (Sasana, 2009). Otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen.

Oleh karena itu, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber dana untuk melakukan pembangunan, yaitu yang berasal dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada transformasi ekonomi, transformasi tenaga kerja dan transformasi kelembagaan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efektifitas pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis regresi, besarnya PAD berhasil menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di

Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh PAD terhadap ketimpangan pembangunan, di mana pada hasil SPSS persamaan ketimpangan pembangunan koefisien PAD sebesar  $-4,220E-7$  atau  $-0,0000004220$ . Ini berarti pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1.000.000,00 per-kapita, maka ketimpangan wilayah akan turun sebesar 0,0000004220. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin besar dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya penurunan ketimpangan pembangunan.

Ini dikarenakan kenaikan PAD dapat memicu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sehingga akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun tabel Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan, kabupaten kota Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011**

No	Jawa Timur	PAD	PE	KP
1	2005	1.801.560	5,46	0,1085
2	2006	2.178.519	5,61	0,1080
3	2007	2.504.136	5,9	0,1073
4	2008	2.504.136	5,88	0,1068
5	2009	2.934.344	5,07	0,1070
6	2010	3.527.730	6,48	0,1065
7	2011	5.480.045	6,67	0,1053

Keterangan:

PAD: Pendapatan Asli Daerah (jutaan)

PE: Pertumbuhan Ekonomi (%)

KP: Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2005-2011 PAD Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan. Yaitu Rp 1.801.560.000.000,00 pada tahun 2005 menjadi Rp 5.480.045.000.000,00 pada tahun 2011. Pada tabel pertumbuhan ekonomi, juga mengalami kenaikan yang signifikan. Yaitu 5,46% pada tahun 2005 menjadi 6,67% pada tahun 2011. Selain itu juga, tabel ketimpangan pembangunan pada tahun 2005-2011 mengalami penurunan. 0,1085 pada tahun 2005 menjadi 0,1053 pada tahun 2011. Jika dihubungkan antara

PAD, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan, maka kenaikan PAD yang digunakan sebagai sumber APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Pernyataan tersebut juga dapat dijelaskan juga dengan analisis korelasi Pearson bahwa peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini dibuktikan dengan nilai positif sebesar 0,664 yang artinya kenaikan PAD akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak negatif pada ketimpangan pembangunan karena dari tabel koefisien korelasi Pearson tersebut pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai negatif -0,723 yang artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi ketimpangan pembangunan.

Penurunan ketimpangan pembangunan tersebut dikarenakan anggaran tersebut digunakan dalam mengoptimalkan dan menaikkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti industri, perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada. Hal ini dapat dijelaskan dengan bertambahnya investor di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 289.996.261.000 US\$ berdasarkan data BPS 2006 sampai 2012. Meskipun investasi yang besar banyak diperoleh oleh wilayah kota dan wilayah kabupaten yang tergolong maju seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang, namun investasi sudah tidak lagi terpusat pada wilayah kota atau wilayah yang maju saja. Ada wilayah-wilayah kabupaten yang kurang maju juga mendapat investasi seperti Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, kabupaten Situbondo dan beberapa wilayah kabupaten lainnya. Sehingga, penyebaran investasi tersebut berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di daerah kabupaten dari pada kota yang mencapai 1.35% berdasarkan data BPS 2006 dan 2012.

Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Musgrave dan Rostow sebelumnya dalam Mangkusobroto (1998) tentang Teori Pengeluaran Pemerintah. Dimana tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk investasi pemerintah, khususnya investasi di bidang infrastruktur. Dengan adanya kenaikan tersebut, akan meningkatkan aktivitas-aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomipun akan bertambah. Oleh karena itu diperlukan pendapatan yang besar untuk membiayai pengeluaran tersebut. Dan salah satunya dapat diperoleh dari PAD. Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pembangunan di wilayah kabupaten yang lebih tinggi dari pada di kota, juga tidak lepas dari faktor kenaikan IPM di kabupaten yang lebih tinggi juga daripada di kota. Kenaikan IPM tersebut mencapai 4,49 % di wilayah kabupaten dan 4,37% di wilayah kota berdasarkan data dari BPS 2006 sampai 2012. Hal ini sejalan dengan model pertumbuhan endogen yang dikembangkan untuk melengkapi teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, yang memusatkan perhatiannya pada pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam perekonomian (Capello, 2007).

Mengacu pada teori pertumbuhan endogen tersebut, bahwa modal manusia merupakan faktor penting dan utama dalam pertumbuhan ekonomi, maka dimungkinkan bahwa dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketimpangan pembangunan dapat berkurang.

Pada Provinsi Jawa Timur bahwa kenaikan IPM dapat menurunkan ketimpangan pembangunan, dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh tingkat rasio IPM daerah terhadap ketimpangan pembangunan, dimana pada hasil SPSS persamaan ketimpangan pembangunana koefisien IPM sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi t-

nya negative. Artinya jika nilai IPM meningkat 1% perkapita tidak akan mengalami penurunan ketimpangan, tetapi jika mengalami kenaikan lebih dari 1% dimungkinkan akan mengalami penurunan ketimpangan pembangunan dikarenakan nilai t-nya negatif. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan IPM di Jawa Timur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan. Adapun tabel dari IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011**

No	Jawa Timur	IPM	PE	KP
1	2005	66,84	5,46	0,1085
2	2006	67,48	5,61	0,1080
3	2007	68,42	5,9	0,1073
4	2008	69,09	5,88	0,1068
5	2009	69,58	5,07	0,1070
6	2010	70,14	6,48	0,1065
7	2011	70,81	6,67	0,1053

Keterangan:

IPM: Indeks Pembangunan Manusia

PE: Pertumbuhan Ekonomi (%)

KP: Ketimpangan Pembangunan

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2005-2011 terjadi peningkatan IPM dari 66,84% menjadi 70,81%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari 5,46% pada tahun 2005 menjadi 6,67% pada tahun 2011. Dan pada kolom Ketimpangan pembangunan pada tahun 2005-2011, mengalami penurunan dari 0,1085 menjadi 0,1053. Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPM akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan.

Pernyataan ini juga dapat dibuktikan dengan analisis korelasi Pearson. Dari hasil korelasi pearson tersebut juga terbukti bahwa IPM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Ini dibuktikan dengan nilai IPM yang positif sebesar 0,614 yang artinya peningkatan IPM akan berdampak peningkatan pada pertumbuhan

ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan dibuktikan dengan nilai negatif sebesar -0,723. Oleh karena itu, jelas bahwa ada hubungan antara peningkatan IPM, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pembangunan.

Meskipun mengalami perbedaan dari setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur tentang IPM, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan, tetapi rata-rata kabupaten dan kota di provinsi jawa timur apabila mengalami peningkatan IPM, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa teori pertumbuhan endogen yang memfokuskan pembangunan manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dibuktikan di Provinsi ini. Maka, dari studi teori dan empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Manusia yang dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Manusia signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan pada 38 kabupaten/kota di provinsi.

## Kesimpulan

Ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson selama tahun 2005-2011 mengalami penurunan dan tergolong rendah dikarenakan nilai indeks Williamsonnya mendekati nilai 0.

Hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2011, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di provinsi Jawa Timur akan menurunkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

PAD yang semakin besar dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah.

IPM yang semakin tinggi dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan

menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah.

### Rekomendasi

1. Pengalokasian investasi ke wilayah-wilayah kabupaten, khususnya di sektor industri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten dan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan antara kabupaten dan kota.
2. Pemerintah daerah perlu menaikkan Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah) yang digunakan sebagai APBD
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan manusia seperti kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya pembangunan manusia secara merata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

---

### Daftar Pustaka

- Brata, Aloysius Gunadi. (2002) **Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia**. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Vol 7, Nomor 2. Hal 113-122 [internet] Available from <<http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/view/645/573>> (Accessed: January 2013)
- Badan Pusat Statistik. (2000) **PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Timur Berbagai Tahun Terbitan**. Surabaya.BPS
- BPS, BAPPENAS dan UNDP. (2001) **Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2001 Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia Indonesia**. Jakarta, BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Badan Pusat Statistik. (2006) **Jawa Timur Dalam Angka 2006**. Jawa Timur, BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2006) **Jawa Timur Dalam Angka 2012**. Jawa Timur,BPS.
- Capello, Roberta. (2007) **Regional Economics, Routledge**. New York, Routledge.
- Hadi, Sasana. (2005) **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kabupaten Banyumas**. Jawa Barat [Internet] Available from <[http://eprints.undip.ac.id/16826/1/Analisis\\_Faktor-Faktor\\_Yang\\_Mempengaruhi...by\\_Hadi\\_Sasana\\_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/16826/1/Analisis_Faktor-Faktor_Yang_Mempengaruhi...by_Hadi_Sasana_(OK).pdf)> (Accessed: January 2013)
- Irawan dan M. Suparmoko. (1988) **Ekonomika Pembangunan**.Yogyakarta, BPFE.
- Mardiasmo (2002) **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta, Andi.
- Mangkoesebroto, GuritNomor (1998) **Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi**. Jakarta, Gramedia Pustaka Umum.
- Mudrajad Kuncoro. (2006) **Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan**. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mopanga, Herwin. (2010) **Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo**. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor [Internet] Available from<[http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46671/Daftar%20Pustaka\\_%202011mab.pdf](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46671/Daftar%20Pustaka_%202011mab.pdf)> (Accessed: January 2013)
- Sadono, SukirNomor (1985) **Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan**.

- Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika
- Sjafrizal (1997) **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma.
- Sjafrizal. (2008) **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi**. Padang Sumatera Barat, Baduose Media.
- Soekarno (2011) **Analisis Dampak Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan 2004-2009**. Bogor, IPB [Internet] Available from <<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51608/2011soe.pdf?sequence=1>> (Accessed: January 2013)
- Stiglitz, E.J. (2000) **Economics of the Public Sector**. New York, W.W. Norton and Company
- Sudarmono, Mulyanto. (2006) **Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Di Jateng**. Fakultas Ekonomi UNDIP. Semarang. Tesis [Internet] Available from <[http://eprints.undip.ac.id/15738/1/Mulyanto\\_SudarmoNomorpdf](http://eprints.undip.ac.id/15738/1/Mulyanto_SudarmoNomorpdf)> (Accessed: January 2013)
- Todaro, Michael P. (1994) **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Jakarta, Erlangga.
- Undang –Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah**. Jakarta. Kementrian Keuangan Indonesia [Internet] Available from <[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU\\_no\\_33\\_th\\_2004.pdf](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_no_33_th_2004.pdf)> (Accessed: January 2013)